



Yofran Hengki
 Ndoluanak¹
 Awaluddin Tjalla²
 Iva Sarifah³

PENGARUH POLITIK ARAH PERKEMBANGAN SUATU BANGSA (KEKUASAAN) TERHADAP KONSTRUKSI PENDIDIKAN

Abstrak

Pengaruh politik arah perkembangan suatu bangsa terhadap konstruksi pendidikan dari masa-masa selalu mengalami pengembangan. Pengaruh politik dalam perkembangan sistem pendidikan di Indonesia sangat mempengaruhi seperti: (a) Politik mempengaruhi kegiatan pendidikan untuk menciptakan nilai dan aspirasi warga negara sebagaimana disyaratkan oleh negara; (b) Politik mempengaruhi anggaran pendidikan; (c) Politik mempengaruhi sumber daya pendidikan seperti gaji guru, prasarana pembelajaran dan guru. mendukung pendidikan; (d) politik mempengaruhi sistem sekolah, seperti struktur sekolah, sistem evaluasi guru dan sistem penerimaan siswa; (e) politik mempengaruhi kualitas lulusan berdasarkan bagaimana lulusan berperilaku secara politik, budaya, ekonomi dan sosial; f) politik mempengaruhi sistem pendidikan. Berdasarkan hasil kajian di atas, maka pemerintah Indonesia harus mampu menciptakan suatu produk hukum bagi sistem pendidikan nasional, yang dapat meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing produksi pendidikan dan sistem pendidikan nasional pada umumnya saat ini.

Kata Kunci: Konstruksi Pendidikan

Abstract

The political influence of the direction of a nation's development on the construction of education has always experienced development over time. The influence of politics in the development of the education system in Indonesia is very influential, such as: (a) Politics influences educational activities to create values and aspirations of citizens as required by the state; (b) Politics influences the education budget; (c) Politics affects educational resources such as teacher salaries, learning infrastructure and teachers. supporting education; (d) politics influences the school system, such as school structure, teacher evaluation system and student admission system; (e) politics influences the quality of graduates based on how graduates behave politically, culturally, economically and socially; f) politics influences the education system. Based on the results of the study above, the Indonesian government must be able to create a legal product for the national education system, which can improve the quality, relevance and competitiveness of educational production and the national education system in general at this time.

Keywords: Educational Construction

PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia telah di atur oleh undang-undang dasar 1945 yang terdapat pada pasal 29 dan termasuk dalam amandemen. Pendidikan yang menjadi tanggung jawab serta kewajiban negara didukung oleh setiap warga negaranya (Dewi & Ulfiah, 2021). Pengaruh perkembangan politik dan pendidikan saling berhubungan erat kaitannya dengan kondisi seperti itu. Maka kita tahu bahwa politik di suatu negara terkhusus di Indonesia sangat menentukan arah dari pendidikan di negara tersebut, masyarakat memahami 2 (dua) hal mengenai keterkaitan politik dan pendidikan, yang pertama yaitu ada dari kelompok masyarakat yang mengatakan politik dan pendidikan tidak berhubungan yang mana masyarakat tersebut mengatakan politik adalah politik dan pendidikan adalah

^{1,2,3}) Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta

email: yofran.hengki.ndoluanak@mhs.unj.ac.id, awaluddin.tjalla@unj.ac.id, ivasarifah@unj.ac.id

pendidikan, namun ada juga masyarakat yang berpendapat lain bahwa politik dan pendidikan sangatlah erat hubungannya dan saling berkaitan satu sama lain (Susanto, 2022).

Pelaksanaan sebuah sistem pendidikan nasional ada satu peraturan yang tercantum dalam pasal 31 ayat 3 undang-undang dasar 1945 (Emmanuel Sujatmoko, 2010). Untuk menjamin mutu pendidikan jadi pemerintah membuat atau menyusun standar pendidikan nasional yang berpengaruh politik terhadap sistem pendidikan nasional, terdapat ketentuan pada undang-undang dasar yang telah di tindaklanjuti dalam bentuk undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang hasilnya dari konsensus politik, 5 (lima) hal yang berpengaruh politik dalam dunia pendidikan di Indonesia yaitu sebagai berikut: (1) Politik sangat berpengaruh aktivitas pendidikan dalam menciptakan nilai serta harapan masyarakat seperti yang dibutuhkan oleh suatu negara yaitu salah satunya negara Indonesia; (2) Kemudian politik juga berpengaruh terhadap biaya atau anggaran pendidikan di Indonesia; (3) Politik juga mempengaruhi sumber daya pendidikan seperti gaji guru sarana dan prasarana yang akan menjadi penunjang kegiatan belajar; (4) Politik juga mempengaruhi pada sistem persekolahan yang mana hal ini berbentuk seperti penerimaan siswa baru, sistem penghargaan terhadap guru; (5) Politik mempengaruhi mutu sumber daya manusia pada suatu instansi persekolahan yang mana di lihat dari bagaimana lulusan pendidikan berperilaku politik, berperilaku budaya serta berperilaku ekonomi dan sosial (Susanto, 2022).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Kekuasaan yaitu kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok sesuai dengan keinginannya (Marianti, 2011). Alokasi adalah pembagian atau pemberian nilai-nilai dalam masyarakat. Sejak Orde lama hingga Orde baru (1945-1998), sistem politik yang identik dengan sistem pemerintahan adalah bersifat sentralistik (Komara, 2016). Artinya, pola interaksi pemerintahan, otoritas, aturan, dan kekuasaan bermuara ke pusat. Semuanya ditentukan dan menjadi kewenangan pusat, sementara pemerintahan daerah lebih bersifat pelaksana, perpanjangan tangan pusat daerah dalam jalur birokrasi yang panjang. Begitu juga halnya dengan sistem pendidikan yang dirancang dan dilaksanakan secara sentralistik. Pengaruh sistem politik terhadap sistem pendidikan bukan saja dalam rekayasa bentuk struktural, prosedural, pedoman kerja, petunjuk pelaksanaan (juklak), petunjuk teknis (juknis) bagaikan kitab suci dari pusat (Jakarta), tetapi juga muatan pendidikan, pengajaran, dan pelatihan pada pendidikan formal dan non formal dengan memasukkan pesan dan misi pemerintah yang berkuasa seperti PSPB, Kewiraan, PPKn, dan P4; dan aksi-kasih normalisasi kehidupan kampus (NKK), membebaskan mahasiswa terlibat langsung dalam politik praktis, menggalakkan kegiatan resimen mahasiswa (berbau militeristik, sistem komando, patuh komandan), dan orientasi mahasiswa baru sesuai dengan keinginan pejabat pusat.

Politik berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan dikarenakan pemerintah sebagai pengambil kebijakan memiliki peran penting dalam menentukan arah dan kebijakan pendidikan (N. Purwanto, 2008) (Hakim et al., 2021). Kebijakan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah dapat mempengaruhi arah perkembangan pendidikan di suatu negara, seperti kebijakan kurikulum, anggaran pendidikan, dan sumber daya pendidikan. Selain itu, politik juga dapat mempengaruhi korupsi dalam sektor pendidikan, yang dapat mengurangi anggaran pendidikan dan mempengaruhi kualitas pendidikan (Eryanto, 2013).

Sistem pendidikan memang bersifat terbuka sehingga pengaruh sistem politik suatu Negara akan sangat terasa, apalagi sistem pendidikan dianggap sangat strategis untuk membentuk dan mengarahkan sikap politik tertentu demi kelestarian kekuasaan pemerintah yang sedang berkuasa (Kadir, 2010). Sistem politik bagi sistem pendidikan akan menjadi salah satu masukan lingkungan (environmental inputs) yang sangat dominan dari masukan lainnya. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu bangsa. Namun, pengaruh politik arah perkembangan suatu bangsa (kekuasaan) dapat mempengaruhi konstruksi pendidikan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memahami pengaruh politik arah perkembangan suatu bangsa terhadap konstruksi pendidikan: (1) Kebijakan Pendidikan: Kebijakan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah

dapat mempengaruhi arah perkembangan pendidikan di suatu negara. Kebijakan pendidikan yang baik dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan memperbaiki sistem pendidikan; (2) Anggaran Pendidikan: Anggaran pendidikan yang disediakan oleh pemerintah juga dapat mempengaruhi konstruksi pendidikan. Jika anggaran pendidikan cukup, maka sistem pendidikan dapat ditingkatkan dan kualitas pendidikan dapat ditingkatkan; (3) Sumber Daya Pendidikan: Sumber daya pendidikan seperti gaji guru, sarana dan prasarana, dan pendidikan guru juga dapat dipengaruhi oleh politik arah perkembangan suatu bangsa. Jika sumber daya pendidikan cukup, maka kualitas pendidikan dapat ditingkatkan. (4) Kurikulum Pendidikan: Kurikulum pendidikan juga dapat dipengaruhi oleh politik arah perkembangan suatu bangsa. Kurikulum pendidikan yang baik dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan memperbaiki sistem pendidikan. (N. Purwanto, 2008) (5) Korupsi: Korupsi dalam sektor pendidikan juga dapat mempengaruhi konstruksi pendidikan. Korupsi dapat mengurangi anggaran pendidikan dan mempengaruhi kualitas pendidikan. Dalam membangun sistem pendidikan yang baik, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan. Dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan dapat memperbaiki sistem pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan di suatu negara (Jumani, 2015).

Pendidikan dan sistem pendidikan harus dilihat sebagai isu politik utama masyarakat. Banyak konflik politik yang mengganggu partai politik, pemerintah, kelompok kepentingan dan aktor-aktor lain yang melakukan agitasi terhadap kebijakan pendidikan (Jumani, 2015). Sistem politik Indonesia tidak memberikan tempat yang cocok bagi lahirnya sistem pendidikan yang baik. Pertarungan yang panjang dan menyiksa di parlemen, uang atau uang jajan pada akhirnya. Perilaku pemimpin yang ingin mengubah kebijakan pendidikan juga karena adanya proyek baru. Sudah berapa lama dan berapa lama para pelaku politik negeri ini sadar akan prioritas pendidikan nasional sebagai isu kemanusiaan dan nasional di Indonesia? Langkah pertama yang dilakukan adalah: (1) mengubah atau menyamakan pendapat tentang peran pendidikan dalam pembangunan nasional; (2) pendidikan dipandang sebagai investasi manusia jangka panjang, bukan beban pembangunan jangka panjang; (3) pendidikan menjadi panglima pembangunan nasional; (4) mengembalikan sistem pendidikan pada ahli atau hakikatnya dan membebaskannya dari kepentingan politik praktis sesaat; dan (5) melindungi hak asasi manusia semaksimal mungkin guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang bermartabat, beradab, sejahtera lahir dan batin (Riskiyono, 2015). Oleh karena itu, para aktor politik harus memenuhi peran politik atau kemauan politiknya untuk memajukan negara dengan menciptakan kebijakan publik yang mendukung terselenggaranya pendidikan yang bermutu, efisien, adil, dan relevan bagi kehidupan masyarakat masa depan yang dinamis dan modern.

Negara Indonesia sebagai salah satu negara yang telah beberapa kali mengganti kurikulum, pada tahun 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melanjutkan proyek pembelajaran merdeka belajar untuk memastikan anak bersekolah, mendapatkan pendidikan berkualitas dan hak atau nilai-nilai sipil untuk mengakses sekolah berkualitas (Khodijah & Kusuma, 2023). Seluruh mitra belajar (termasuk siswa) diyakini sebagai pemecah masalah dan memberikan pemberdayaan dan dukungan penuh. Rencana Pendanaan Pendidikan tahun 2021 sangat tinggi karena Rencana Belanja Pendidikan tahun 2021 akan meningkat lima kali lipat menjadi Rp 550 triliun atau 20% dari RP negara yang pasti terpakai. 2095,7 triliun. Usulan biaya akan disalurkan melalui biaya layanan pendidikan pemerintah pusat negara bagian sebesar Rp. 49,2 triliun. Jasa penelitian, inovasi dan pendidikan berkelanjutan Rp. 39,5 triliun, ibadah 46,8 triliun rubel. Lalu saat itu Rp 10,7 triliun untuk layanan publik dan yayasan lainnya. Begitu pula melalui pertukaran kawasan dan cadangan kota sebesar Rp. 267,9 triliun dan pedoman belanja terencana yang didukung pendanaan sebesar Rp. 5 triliun. Dengan demikian, rencana belanja absolut sekolah adalah sebesar Rp 419,2 triliun dan sejalan dengan konstitusi, dimana rencana belanja pendidikan pada dasarnya adalah 20% dari APBN (Khoiri et al., 2021).

Pengaruh politik terhadap sumber daya manusia pendidikan seperti (gaji, SarPras dll). Salah satu hal terpenting dalam merancang pengalaman belajar bermakna adalah kehadiran guru yang profesional (N. A. Purwanto, 2008). Dari 2,7 juta guru di Indonesia, tingkat pendidikannya masih rendah, yakni 65% masa pendidikan gurunya kurang dari 4 tahun. Penyediaan guru yang profesional terabaikan. Jika status profesional guru disamakan dengan profesi lain, seperti dokter dan pengacara, maka profesionalisme guru masih tertinggal. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang mewajibkan guru memiliki pelatihan A1 dan D4+. Salah satu kelemahan pelatihan guru sebelum mengajar adalah praktik profesional. Pada fase ini, mahasiswa belajar menerapkan berbagai pengetahuan inti akademik profesional selama 2 semester. Siswa menghabiskan 2/3 waktunya di lingkungan sekolah mengamati, membimbing dan mengarahkan pembelajaran di bawah bimbingan guru yang profesional. Praktik sertifikasi guru pada mulanya merupakan upaya

transformasi guru saat ini menjadi guru profesional (Hoesny & Darmayanti, 2021). Namun, ada beberapa indikasi bahwa praktik sertifikasi guru gagal mengubah guru menjadi profesional. Karena guru yang mengupayakan sertifikasi hanya termotivasi untuk memperoleh manfaat dari sertifikasi, maka tidak ada indikasi bahwa mereka akan menjadi guru profesional setelah sertifikasi, baik dalam merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mendiagnosis berbagai permasalahan siswa (Latiana, 2019). Perbedaan antara guru bersertifikat dan non-sertifikasi.

Dampak politik terhadap sistem (struktur guru dan siswa serta gaji) Mengembangkan akses ke sekolah merupakan pilar peraturan yang mengarah pada peningkatan batasan satuan pendidikan, yang tujuan utamanya adalah menjamin kebebasan yang setara bagi seluruh warga untuk bersekolah. Untuk menerima pengaturan pendidikan (Sujatmoko, 2016). Selama 4 tahun terakhir, berbagai proyek yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan telah dilaksanakan untuk menerapkan strategi dasar - untuk memperluas dan menyamakan partisipasi dalam pendidikan. Pembangunan dan peningkatan organisasi pendidikan secara mendasar dan teratur, dengan fokus pada perubahan internal untuk meningkatkan kepemilikan, kepemimpinan, dan tanggung jawab bersama (Fitriyani, 2019). Pendekatan ini mencakup pembiayaan pelaksanaan pembelajaran berbasis, pelaksanaan manajemen sekolah dan koalisi penuh regional dalam organisasi, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pendidikan, termasuk pengakuan terhadap tata kelola pendidikan yang lebih berkualitas, menarik, produktif, signifikan secara regional dan murni. dan bebas dari intrik dan nepotisme (Muh. Anwar HM, 2018). Selain itu, guna mewujudkan manajemen sekolah yang sehat dan bertanggung jawab, dilaksanakan secara serius melalui pengendalian internal, manajemen lokal, dan pengendalian praktis yang terpadu dan penting.

Era New Normal ini semakin nyata seiring dengan semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang terpapar virus corona, dan kini dunia juga sedang memainkan pandemi new normal. Nantinya penerapan di lingkungan sekolah akan terus berlanjut hingga akhir tahun 2020, namun ketika proses belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh atau online, ternyata kendala juga dialami dalam sistem pendidikan. Mau tidak mau, menurut penulisnya, baik siswa maupun guru harus bisa beradaptasi dengan pembelajaran daring atau memilih keluar. Artinya dalam kondisi era new normal ini kita mutlak harus menjauhi dan lebih baik berada di rumah saja, jika tidak melakukan aktivitas penting di luar rumah maka pelaku hanya berperan sebagai pengganti. belajar mandiri dan menghargai waktu bersama keluarga sebanyak yang bisa diharapkan di zaman baru.

Kita harus mewaspadai situasi saat ini dengan melakukan hal-hal bermanfaat seperti unit, kelas, lomba menulis, dll. Idealnya, pandemi virus corona segera berakhir di Indonesia dan dunia sehingga lingkungan sekolah menjadi lebih baik.

SIMPULAN

Pengaruh politik dalam perkembangan sistem pendidikan di Indonesia sangat mempengaruhi seperti: (a) Politik mempengaruhi kegiatan pendidikan untuk menciptakan nilai dan aspirasi warga negara sebagaimana disyaratkan oleh negara; (b) Politik mempengaruhi anggaran pendidikan; (c) Politik mempengaruhi sumber daya pendidikan seperti gaji guru, prasarana pembelajaran dan guru. mendukung pendidikan; (d) politik mempengaruhi sistem sekolah, seperti struktur sekolah, sistem evaluasi guru dan sistem penerimaan siswa; (e) politik mempengaruhi kualitas lulusan berdasarkan bagaimana lulusan berperilaku secara politik, budaya, ekonomi dan sosial; f) politik mempengaruhi sistem pendidikan. Berdasarkan hasil kajian di atas, maka pemerintah Indonesia harus mampu menciptakan suatu produk hukum bagi sistem pendidikan nasional, yang dapat meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing produksi pendidikan dan sistem pendidikan nasional pada umumnya saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, D. A., & Ulfiah, Z. (2021). Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Pembangunan Karakter Bangsa. *Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 1(1), 95–100. <https://doi.org/10.51878/learning.v1i1.205>
- Emmanuel Sujatmoko. (2010). Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan. *Jurnal Konstitusi*, 7(1), 182–211. <https://media.neliti.com/media/publications/110344-ID-hak-warga-negara-dalam-memperoleh-pendid.pdf>
- Eryanto, H. (2013). Pengaruh Faktor POLEKSOSBUD terhadap Pendidikan dan Peranan Pendidikan dalam Membangun POLEKSOSBUD. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPEB)*, 1(2), 15–39.
- Fitriyani, F. (2019). Konsep Organisasi Pendidikan dalam Pemberdayaan Sekolah. *EL-Ghiroh*,

- 17(02), 61–80. <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v17i02.105>
- Hakim, L., Sukarno, S., & El Widdah, M. (2021). Dampak Perkembangan Politik Terhadap Manajemen Pendidikan Islam. *Jurnal Literasiologi*, 6(1), 32–46. <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v6i1.239>
- Hoesny, M. U., & Darmayanti, R. (2021). Permasalahan dan Solusi untuk Meningkatkan Kompetensi dan Kualitas Guru : Sebuah Kajian Pustaka. *Scholaria : Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 11(2), 123–132. <https://ejournal.uksw.edu/scholaria/article/view/3595>
- Jumani. (2015). Implementasi Politik Pendidikan Dalam Kurikulum 2013. *Dewantara*, 1(2), 180–195.
- Kadir, A. (2010). Kemauan Politik Untuk Kemajuan Pendidikan Dan Pendidikan Politik Untuk Kemajuan Bangsa. *Shautut Tarbiyah*, 16(10), 48–68.
- Khodijah, S., & Kusuma, I. H. (2023). Perbandingan Pendidikan Indonesia Dan India Tinjauan Kebijakan Terbaru. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 8(1), 89–114. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/mukaddimah/article/view/3150/2111>
- Khoiri, A., Zaini, & Munib, A. (2021). Pengaruh Politik Hukum Terhadap Sistem Pendidikan Era New Normal. *Jurnal Sumenep*, 1(2), 1–2.
- Komara, E. (2016). Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi. *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 2(2), 117–124. <https://doi.org/10.15408/sd.v2i2.2814>
- Latiana, L. (2019). Peran Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Profesionalisme Pendidik. *Edukasi*, 1(3), 1–16. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/edukasi/...> · PDF file
- Marianti, M. M. (2011). Kekuasaan dan Taktik Mempengaruhi Orang Lain Dalam Organisasi. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 7(1), 45–58.
- Muh. Anwar HM. (2018). Manajemen Berbasis Sekolah. *Al-Khwarizmi: Jurnal Pendidikan Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam*, 1(1), 87–96. <https://doi.org/10.24256/jpmipa.v1i1.86>
- Purwanto, N. (2008). Pengaruh Politik Dalam Bidang Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan UNY*, 14(02), 114488.
- Purwanto, N. A. (2008). Peningkatan Profesionalisme Guru. *Fondasia*, 1(9).
- Riskiyono, J. (2015). Public Participation in the Formation of Legislation to Achieve Prosperity. *Aspirasi*, 6(2), 159–176.
- Sujatmoko, E. (2016). Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan. *Jurnal Konstitusi*, 7(1), 181. <https://doi.org/10.31078/jk718>
- Susanto. (2022). Pengaruh Politik dalam Bidang Pendidikan di Indonesia. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/fivie44956/62921a3053e2c36c0c35f742/pengaruh-pulitik-dalam-bidang-pendidikan-di-indonesia>